

NASIONALISME SUFISTIK DALAM TAREKAT ŞIDDĪQĪYAH DI PLOSO JOMBANG

Tasmuji

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: tasmuji@uinsby.ac.id

Abstract: The discussion about the history of tarekat (Sufi order) has its own uniqueness. This is because every tarekat possesses certain characteristics which are not found in other tarekat, though all Sufi orders generally have the same purpose, namely getting closer to Allah as a fundamental part of the Sufi path. The difference of name and characteristic of each tarekat has always been associated with the experience of its founder when he climbs the path of Sufism. The Tarekat Şiddiqiyah, based in Jombang East Java, has been among the existing Sufi orders that possess uniquely exceptional characteristics. This article attempts to specifically review the history of the Şiddiqiyah viewed from a number of perspectives, which distinguish it from other Sufi orders. The discussion deals with the emergence of the Şiddiqiyah, its teachings, the knowledge base that became the way of this tarekat, and matters concerning with the episteme specificity of the tarekat. The study finds that the Şiddiqiyah seeks to uplift a new stream of Sufism, namely *al-taşawwuf al-siyāsī*, by emphasizing the existence of a basic relationship between Sufism in Islam and nationalism in Indonesia. The Şiddiqiyah also offers the idea of Walisongo of the Republic of Indonesia and August 18, 1945, as the date of birth of Indonesia.

Keywords: Tarekat Şiddiqiyah; Sufistic nationalism; *al-taşawwuf al-siyāsī*; Walisongo.

Pendahuluan

Şiddiqiyah adalah salah satu aliran tasawuf yang mempunyai beberapa gagasan unik, di antaranya ajaran tentang nasionalisme. Ajaran ini merupakan satu dari delapan ajaran pokok kesanggupan

sebagai anggota jemaah tarekat.¹ Dalam dunia tasawuf selama ini, ajaran tentang cinta tanah air dalam bentuk paham nasionalisme bukan merupakan objek kajian tasawuf yang cukup penting bahkan hampir tidak tersentuh sama sekali. Ajaran nasionalisme selama ini dianggap sebagai persoalan yang bersifat duniawi belaka, sehingga nasionalisme yang di dalamnya memuat ajaran cinta tanah air dianggap justru dapat menjauhkan hati nurani manusia dari Tuhannya.²

Persoalan tersebut tentu tidak melanda semua warga bangsa Indonesia, sebab masih banyak anak-anak negeri ini yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Di antara mereka adalah warga jemaah tarekat Siddiqiyah. Nasionalisme jemaah ini dibuktikan dengan hadirnya ajaran bahwa setiap jemaah wajib dan sanggup memiliki rasa cinta pada tanah air, Indonesia. Hal ini dapat ditilik dari dasar ajarannya bahwa mencintai tanah air merupakan kewajiban yang harus diemban dan dibuktikan bagi setiap jemaah warga tarekat Siddiqiyah.³

Ada statemen yang sangat tegas dari kiai Muchammad Muchtar Mu'thi, selaku mursyid sekaligus pimpinan Siddiqiyah, yang ditujukan bagi warga Siddiqiyah yang tidak sanggup cinta kepada tanah airnya berarti bukan murid Siddiqiyah. Mu'thi secara tegas menyatakan

¹ Mochammad Muchtar Mu'thi, *Penjelasan Singkat Mengenai Delapan Kesanggupan* (Ploso, Jombang: al-Ikhwan, t.th.), 10. Setiap anggota jemaah tarekat Siddiqiyah selalu berikrar delapan kesanggupan dalam setiap acara yang diadakan oleh tarekat Siddiqiyah. Delapan kesanggupan tersebut yaitu: 1) sanggup bakti kepada Allāh; 2) Rasul; 3) orang tua; 4) sesama manusia; 5) negara Republik Indonesia; 6). Cinta kepada tanah air Indonesia; 7) mengamalkan tarekat Siddiqiyah; dan 8) sanggup menghargai waktu.

² Tasawuf (sufisme) adalah bentuk *masdar* berasal dari kata *suf* yang berarti wol, yaitu bahan pakaian kasar yang dipakai oleh orang-orang sufi sebagai tanda kepertapaan dan penolakan dunia. Kata sufi juga berasal dari kata *safa* yang artinya “menjadi murni” atau dari kata “*suffab*” yaitu bagian tempat yang ditinggikan pada masjid Nabi di Madinah, di mana orang-orang miskin bisa duduk-duduk dan melakukan peribadatan. Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 56. Ahmad Syafi'i Mufid, *Tangkalukan, Abangan dan Tarekat: Kebangkitan Agama di Jawa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 21. Abū Ṭalib al-Makkī, *Buku Saku Hikmah dan Makrifat: Mengerti Kedalaman Makna Berilmu dan Bertaubid dalam Kehidupan*, terj. Abad Badruzzaman (Jakarta: Zaman, 2013), 322. A. Wahib Mu'thi, *Tarekat: Sejarah Timbulnya, Macam-macam, dan Ajaran-ajaran Tasawuf* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.th.), 141. Imron Mustofa, “Fisika Atom sebagai Basis Filosofis Ilmu dalam Perspektif al-Ghazali”, *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol. 12, no. 1 (Juni, 2017), 66.

³ *Ibid.*

bahwa mereka yang tidak sanggup mengemban nasionalisme ini dipersilahkan belajar ke tarekat lain tidak mengajarkan cinta tanah air. Baginya nasionalisme merupakan satu dari dua dimensi yang ada dalam dunia sufistik. Nasionalisme merupakan satu bahasan dalam wilayah fisik jasmaniah yang sangat erat hubungannya dengan kawasan spiritual-rohaniyah, yang mana keduanya memiliki ciri khasnya masing-masing.⁴

Tarekat Siddiqiyah tampaknya satu dari sedikit gerakan yang mencoba merespons problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan melegitimasi hal itu dalam ranah sufistik. Siddiqiyah tidak hanya mengedepankan pelbagai praktik asketisisme (*zuhd*), tapi juga menjadikan nasionalisme sebagai bagian dari praktik tersebut. Tarekat yang sejatinya merupakan organisasi para *sālik*⁵ yang bertujuan *taqarrub* hanya kepada Allāh, sering disalahpahami oleh beberapa orang. Bagi sebagian kalangan Muslim, tarekat dinilai tidak relevan dengan modernisasi, bahkan dipandang sebagai ganjalan umat Islam dalam menggapai kemajuan dalam pelbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, sufisme dengan pelbagai bentuknya harus dijauhi.⁶ Pendapat ini menunjukkan bahwa sufisme sebagai “tertuduh” bukanlah suatu hal yang baru, yang selalu dijadikan sasaran kritik oleh kaum reformis untuk pembaruan dan pemurnian Islam sejak awal abad ke-20 Masehi.⁷

Dalam persoalan ini kehidupan kaum sufi menghadapi tantangan baru, pembaharuan pemikiran dari umat Islam sendiri yang telah dipengaruhi oleh peradaban Barat terlebih lagi gerakan pemikiran reformis mulai mendominasi beberapa aspek kehidupan umat Islam, utamanya sejak era kolonialisme Barat atas beberapa negara Islam.⁸ Peradaban mereka yang diklaim maju ternyata tidak selalu bertampak positif. Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan pola pikir, nilai dan gaya hidup mulai mengalami pergeseran orientasi ke arah

⁴ Mochammad Muchtar Mu'thi, *Dasar dan Sumber Aspirasi Berdirinya Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia: yang Dijinai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan* (Ploso, Jombang: Akas, 2009), 31.

⁵ Mufid, *Tangkalukan, Abangan*, 22.

⁶ Azyumardi Azra, kata pengantar “Sufisme dan ‘yang Modern’”, Martin van Bruinessen et al. (ed), *Urban Sufism* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), iii.

⁷ *Ibid.*, iv.

⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 15.

yang lebih hedonis. Fakta ini tentunya sangat bertolak belakang dengan ajaran esoterik dalam tasawuf.⁹

Dengan mengungkap beberapa fenomena tersebut maka dalam pembahasan makalah ini diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran konkret tentang bagaimana membangun sikap positif untuk dapat diambil darinya respons dan langkah-langkah yang baik dalam menata hubungan dalam beragama dan sekaligus bernegara yang baik dengan belajar dari ajaran tarekat Siddiqiyah tentang cinta Tanah Air.

Lintas Sejarah Tarekat Siddiqiyah

Dalam konteks sejarah tarekat di Indonesia, nama tarekat Siddiqiyah memiliki kekhasan baik secara historis maupun konsepsi bangunan sufi yang diamalkan yang mempengaruhi perjalanan hidup para anggotanya. Jika kita mengulas jejak historis tarekat Siddiqiyah, maka tidaklah lengkap tanpa didahului dengan ulasan sosok K.H. Muchammad Muchtar. Alasannya, sederhana, sebab ia dipandang sebagai sosok pertama yang menginisiasi dan menyebarkan ajaran-ajaran tarekat Siddiqiyah sehingga sampai hari ini tetap eksis di tengah masyarakat luas dengan keanggotaan yang berada di berbagai cabang di Indonesia. Selaku mursyid, Kiai Muchtar menjadi pusat energi gerak ketasawufan dari tarekat Siddiqiyah, termasuk gerak tarekat ini dalam merespons problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut penjelasan Mu'thi, sebagai satu tarekat Siddiqiyah awalnya lahir di negeri Arab, untuk selanjutnya berkembang ke pelbagai negara. Perkembangannya sejalan dengan pertumbuhan Islam. Nama Siddiqiyah sendiri menurut Mu'thi sejatinya mengalami metamorfosis, yang pada tahap akhir perjalannya mengalami pelbagai persoalan yang mengakibatkan kurang familiarnya istilah tersebut di telinga para penggiat sufisme di Indonesia, bahkan di dunia Islam secara umum. Faktor inilah yang menurut mursyid tarekat Siddiqiyah tersebut menyebabkan kurang dikenalnya Siddiqiyah sebagai satu mazhab dalam tarekat.¹⁰

⁹ Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi tentang kerangka metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))" (Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 189-196.

¹⁰ Mochammad Muchtar Mu'thi, *Informasi tentang Shiddiqiyah* (Jombang: YPS, 1992), 14-15.

Bagi Mu'thi nama Ṣiddīqīyah sejatinya merujuk pada nama khalīfah pertama umat Islam pasca-Rasul, Abū Bakr, melalui penisbahan gelar al-Ṣiddīq dari Rasul kepada nama yang disebut terakhir. Sebagaimana diketahui gelar ini diperoleh sebagai bentuk penghargaan Rasul kepada Abū Bakr karena telah membenarkan terjadinya *Isrā' Mi'raj*-nya yang saat itu tidak diakui bahkan didustakan oleh mayoritas umat manusia saat itu terlebih lagi kaum Quraysh.¹¹

Guna mendukung gagasannya, kiai Muchtar Mu'thi menisbahkan keyakinannya kepada kitab *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalat 'Ālam al-Ghuyūb* yang ditulis oleh Muḥammad Amīn al-Kurdī al-Irbilī. Nama yang disebut terakhir menjelaskan bahwa tarekat ini memiliki silsilah yang sampai pada Abū Bakr al-Ṣiddīq. Ia juga berpendapat bahwa tarekat ini di tangan Ṭāifur b. 'Īsā Abī Yazīd al-Buṣṭāmī disebut sebagai tarekat Ṣiddīqīyah. Dengan alasan ini Mu'thi menilai bahwa Ṣiddīqīyah merupakan nama silsilah di lain pihak ia juga menolak bahwa Ṣiddīqīyah sebagai nama ajaran. Selain itu, dalam perkembangannya silsilah tarekat Ṣiddīqīyah mengalarni berbagai pergantian nama. Perubahan nama tersebut terjadi seiring dengan perkembangan nama tokoh yang mempopulerkannya.¹²

Berikut silsilah singkat perkembangan tarekat ini sebagai mana dijelaskan oleh Mu'thi:¹³

Tabel 3:
Silsilah Perubahan Nama Tarekat Ṣiddīqīyah

Fase	Nama Mursyid	Perubahan Nama Tarekat
1	Allāh Jibrīl Muḥammad Abū Bakr al-Ṣiddīq Salmān al-Farīsī Qāsīm b. Muḥammad b. Abī Bakr al-Ṣiddīq Imām Ja'far Ṣādiq	Di tangan Imām Ja'far Ṣādiq tarekat ini dikenal dengan sebutan tarekat Ṣiddīqīyah.
2	Abū Yazīd Ṭāifur b. 'Īsā b. Adam b. Sarushan al-Buṣṭāmī Abū al-Ḥasan 'Alī b. Abī Ja'far	Di bawah kendali Abū Ya'qūb Yūsuf al-Ḥamdānī tarekat ini dikenal dengan

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., 14-15.

¹³ Muḥammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalat 'Ulūm al-Ghuyūb* (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1994), 500-502.

	al-Kharqanī Abū ‘Alī al-Faḍāl b. Muḥammad al-Ṭīrsī al-Farmadī Abū Ya‘qūb Yūsuf al-Ḥamdānī	sebutan tarekat al-Ṭāifurīyah.
3	A. Khāliq A. al-Ghajduwānī b. al-Imam ‘Abd al-Jalīl ‘Ārif al-Riwīkarī Maḥmūd al- Anjirī Faḡhnawī ‘Alī al-Rumaytānī al-Mashhūr bi al- ‘Azīzānī Muḥammad Baba al-Sarnasi ‘Āmir Kullalī b. Sayyid Hamzah	Pada era ‘Āmir Kullalī b. Sayyid Hamzah tarekat ini dikenal sebagai al- Khawajikanīyah.
4	M. Bahā’ al-Dīn al- Naqshābandī b. Muḥammad b. M. Sharīf al-Husayn al-Awsī al- Bukhārī Muḥammad b. ‘Ala al-Dīn al- Aṭārī Ya‘qūb al-Jarkhī	Mulai era Muḥammad b. ‘Ala al-Dīn al-Aṭārī Ya‘qūb al- Jarkhī nama tarekat ini mulai dikenal dengan sebutan tarekat al-Naqshābandīyah.
5	Naşīr al-Dīn ‘Ubayd Allāh al- Aḥrār al-Samarqānī b. Maḥmūd b. Shihāb al-Dīn Muḥammad al-Zahīd Darwis Muḥammad al- Samarqandī Muhammad al- Khawajaki al-Amkani al- Samarqanī Muḥammad al-Baqī’ ni Allāh	Di zaman Muḥammad al- Baqī’ ni Allāh nama tarekat ini berubah menjadi tarekat Aḥrārīyah.
6	Aḥmad al-Farūqī al-Sirhindī Muḥammad Ma’sūm Muḥammad Sayf al-Dīn Muḥammad Nūr al-Badwānī Habīb Allāh Janījananī Muṇtahīr ‘Abd Allāh al-Dahlawī	Saat ‘Abd Allāh al-Dahlawī memimpin nama tarekat ini disebut tarekat al- Mujaddadīyah.
7	Khalīd Dhiyā’ ‘Uthmān Sirāj al-Mīllah ‘Umar al-Qaṭb al-Irshād Muḥammad Amīn al-Kurdī al- Irbil	Di bawah mursyid Muḥammad Amīn al-Kurdī al-Irbil nama tarekat ini disebut Khalīdīyah.

Penjelasan silsilah di atas setidaknya telah menyuguhkan informasi kepada kita bahwa nama tarekat Şiddiqiyah bukanlah nama

baku yang tidak mengalami perubahan istilah. Kenyataannya dalam sejarah perkembangannya tarekat ini telah mengalami perubahan redaksi nama, setidaknya sebanyak tujuh kali yang kesemuanya sangat tergantung pada mursyid yang memimpin saat itu. Nama-nama yang pernah melekat pada tarekat ini sesuai penjelasan Mu'thi di atas, dengan mengutip pendapat al-Kurdi dalam *Tamwīr al-Qulūb fī Mu'āmalat 'Ulūm al-Ghuyūb*, di antaranya adalah Ṣiddīqīyah; al-Ṭāifurīyah; al-Khawajikanīyah; al-Naqshābandīyah; Aḥrārīyah; al-Mujaddadīyah dan Khalīdīyah.¹⁴ Pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Aboebakar Atjeh menyatakan bahwa tarekat Khalwātīyah yang merupakan salah satu cabang tarekat Suhrawardīyah juga seringkali menamakan diri mereka dengan sebutan Ṣiddīqīyah. Alasanya, karena mereka menganggap berasal dari keturunan Abū Bakr al-Ṣiddīq.¹⁵

Musyrifah Sunanto, *Tarekat Khalwatīyah Perkembangannya di Indonesia* ikut menyuguhkan pendapatnya tentang silsilah tarekat Khalwātīyah yang terdiri dari tiga puluh tiga nama (33) yang akhirnya bertemu dengan tarekat Ṣiddīqīyah.¹⁶ Ditinjau dari penjelasan Musyrifah Sunanto dan pendapat al-Kurdi setidaknya dapat disimpulkan bahwa dari sisi silsilah dapat diketahui bahwa penamaan tarekat Suhrāwardīyah dengan tarekat Ṣiddīqīyah merujuk pada Abū Najīb b. 'Abd Allāh al-Bakr al-Ṣiddīqī yang dikatakan sebagai keturunan Abū Bakr al-Ṣiddīq, bukan merujuk kepada silsilah tarekat yang dinisbahkan kepada Abū Bakr, sebab tarekat Suhrawardīyah mengikuti jalur 'Alī b. Abī Ṭālib.

Memperhatikan kedua silsilah dan penamaan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nama Ṣiddīqīyah digunakan untuk dua hal. Pertama, digunakan untuk silsilah tarekat sebagaimana silsilah tarekat Ṣiddīqīyah yang akhirnya berubah nama menjadi tarekat Ṣiddīqīyah; al-Ṭāifurīyah; al-Khawajikanīyah; al-Naqshābandīyah; Aḥrārīyah; al-Mujaddadīyah dan Khalīdīyah. Tarekat-tarekat tersebut memang mengambil jalur mata rantai Abū

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Aboebakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat (Uraian Mistik)* (Solo: Ramadhani, 1992), 337.

¹⁶ Musyrifah Sunanto, "Tarekat Khalwatīyah Perkembangannya di Indonesia", Sri Mulyati et. al., *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 143-144. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), 287.

Bakr. Kedua, digunakan untuk menyebut silsilah keturunan yang dikenal sebagai kelompok Ṣiddīqīyah sebagaimana silsilah tarekat Suhrawardīyah yang kemudian berubah menjadi tarekat Khalwatīyah.

Meskipun menisbahkan kepada al-Ṣiddīq, yaitu julukan Abū Bakr namun sejatinya tarekat tersebut hanya sampai pada keturunannya, dan akhir silsilahnya berpangkal pada ‘Alī b. Abī Ṭālib. Selanjutnya, istilah tersebut dalam perkembangan selanjutnya terkadang saling tumpang tindih, karena ada orang yang mengalami pembaiatan pada kedua tarekat tersebut, misalnya Syekh Yūsuf Ṭāḥ al-Khalwatī. Menurut keterangan Van Bruinessen, Yūsuf selain melakukan baiat kepada tarekat Khalwatīyah, ternyata juga melakukan baiat pada tarekat-tarekat lain seperti tarekat Naqshābandīyah, Qadīrīyah, Shaṭṭārīyah dan Ba‘lāwīyah. Bahkan dalam beberapa risalahnya ia lebih banyak mengutip pendapat syekh Naqshābandīyah dan para syekh Khalwatīyah.¹⁷

Pengakuan terhadap eksistensi tarekat Ṣiddīqīyah dapat dijumpai dalam karya yang berjudul *al-Salsabil al-Ma‘īn fī al-Tarāiq al-Arba‘in*, karya tangan syekh Muḥammad al-Sanūsī al-Idrīsī (w. 1859), seperti yang dikutip Carl W. Ernst. Menurutnya di antara empat puluh tarekat yang ditulisnya adalah tarekat Ṣiddīqīyah yang dinisbahkan pada Abū Bakr al-Ṣiddīq, walaupun sekarang tidak berwujud, atau hanya tersisa teori tentang tarekat-tarekat tersebut.¹⁸

Argumen lain yang digunakan oleh mursyid Tarekat Ṣiddīqīyah untuk memperkuat keberadaan Tarekat Ṣiddīqīyah dalam pentas sejarah ta.sawuf adalah keterangan yang termuat dalam berbagai macam kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu. Misalnya saja dalam kitab *Sharḥ al-Hikam* tulisan Ibn Abbas al-Randi yang intinya menjelaskan bahwa manusia telah menyakittinya satu kali. Perbuatan itu menyebabkan al-Randi merasa sampai *se-dhir’an*. Dampak lanjutan darinya memunculkan mimpi bahwa Rasul berkata padanya bahwa salah satu ciri-ciri orang yang benar adalah banyaknya musuh yang tidak menyukainya, namun ia tidak memperdulikan mereka.¹⁹

Syahru’l A’dam dalam disertasinya *Tarekat Ṣiddīqīyah di Indonesia* juga mengutip beberapa ungkapan cendekiawan Muslim mengenai

¹⁷ Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, 288-290.

¹⁸ Carl W. Ernst, *Ajaran dan Amaliyah Tasawuf*, terj. Arif Anwar (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), 1.37.

¹⁹ Ibn. Abbad al-Randi, *Sharḥ al-Hikam*, vol. 2 (Indonesia: Sangkapura-Jeddah, t.th.), 58.

kata Ṣiddīqīyah. Di antara nama-nama tersebut ada ‘Abd al-Karīm al-Jillī dalam karyanya *al-Insān al-Kāmil* dengan ungkapan bahwa Ṣiddīqīyah dibangun berpondasikan enam pondasi utama, Islam, Iman, *ṣilah* (relasi), *iḥsān*, syahadat dan makrifat. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan ungkapan Muḥammad Ḥaqqī al-Naāzili dalam bukunya *Khaṣīnat al-Asrār*. Nama yang disebut terakhir menyatakan bahwa ada beberapa jendela (*manāfidh*) para *al-Shaykh al-Rabbānīyah* dan tempat penampungan limpahan tarekat Ṣiddīqīyah, ‘Alāwīyah dan Khadīrīyah, yang merupakan merupakan tempat mengalirnya hikmah Muḥammadiyah.²⁰

Pelbagai keterangan di atas telah menegaskan anggapan bahwa tarekat Ṣiddīqīyah sejatinya bukan tarekat yang muncul tanpa asal muasal yang jelas. Ia dapat dikatakan sebagai perwujudan tarekat lama dengan nama baru yang eksisistensinya telah adalah dalam tradisi Islam. Dengan adanya kenyataan bahwa tarekat ini mengalami pasang surut bersamaan pergantian mursyid yang secara tidak langsung menyebabkan pergeseran nama, Ṣiddīqīyah mempunyai alasan untuk membenarkan jastifikasinya bahwa ia tidak lahir tanpa *sanad* tradisi yang jelas.

Kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah *Barakah*

Dalam pandangan Ṣiddīqīyah hakikat kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus bukan merupakan bentuk ideal dari suatu pemerintahan. Kemerdekaan merupakan satu bentuk fitrah sekaligus hak asasi manusia sebagai hak kodrati bagi setiap bangsa yang ada. Oleh karena itu, dalam perspektif tarekat ini, tidak mengherankan kalau dalam alinea awal pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan dengan jelas ungkapan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. Ungkapan ini menjelaskan bahwa para perumus naskah UUD 1945 paham benar tentang hak kodrati semacam ini. Alih-alih menggunakan ungkapan semacam “kemerdekaan adalah buah perjuangan”, atau “berkat perjuangan para pahlawan”, para perumus naskah tersebut memilih untuk mencantumkan kemerdekaan sebagai satu *primordial gift* dari Tuhan untuk segenap bangsa dan Negara, dalam hal ini Indonesia.

²⁰ Syahrul A’dam, ‘Tarekat Shiddiqiyah di Indonesia (Studi tentang Ajaran dan Penyebarannya)’ (Disertasi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 103-104.

Melalui keterpenuhan hak asasi paling dasar dari suatu bangsa semacam ini suatu bangsa dapat menamakan dirinya telah “merdeka”. Merdeka merupakan hak milik bangsa yang paling mulia, berharga dan penting bagi perkembangannya. Apabila satu bangsa telah kehilangan hak asasinya untuk merdeka, maka ia akan diperlakukan di luar batas-batas peri kemanusiaan, mengalami pelbagai penindasan, penghinaan dan kesengsaraan dalam hidup sebagaimana Indonesia dahulu yang dijajah oleh Belanda dan Jepang.²¹

Setelah Jepang mengalami kekalahan perang pada Perang Dunia II, maka bangsa Indonesia tidak menunggu lama untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Alasan yang paling mendasar dari kesegeraan proklamasi ini dapat ditemukan dari jawaban yang akan muncul jika ditanyakan “dari mana bangsa Indonesia mendapat kemerdekaannya? apakah hadiah dari imperialis, hasil minta-minta kepada pemerintah Jepang, ataukah buah dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri?” maka jawaban yang dirasa paling tepat, dengan merujuk alenia pertama dari pembukaan UUD 1945 di atas adalah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dari berkat, Rahmat Allāh serta keinginan luhur bangsa Indonesia.

Pernyataan di atas diperkuat dengan hadirnya ungkapan pada alenia ke-3 dari pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “atas berkat rahmat Allāh Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Hal menarik yang dapat kita temukan di sini adalah bila ditarik mundur ke belakang, sebenarnya kalimat “atas berkat Rahmat Allāh Yang Maha Kuasa” itu adalah pesan dari empat tokoh tasawuf yang yang sampi pada tingkat derajat *inkishāf* atau telah terbuka mata hatinya dan mampu mengetahui masa depan. Menurut Sutikno, hal ini telah disampaikan kepada Soekarno sekitar lima bulan sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu *founding father* negara ini, terutama Soekarno tengah mencari petunjuk tentang saat yang tepat guna memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keempat tokoh sufi tersebut adalah Syekh Musa dari Cianjur yang saat itu tengah berusia sekitar 80 tahun; Kiai H. Abdul Mu’thi berasal dari Madiun; Sang Alif, dikenal juga sebagai Sosro Kartono yang merupakan kakak

²¹ Muntashir Billah, *17 Agustus 1945 Bukan Kemerdekaan Republik Indonesia* (Jombang: Al Ikhwan, 2012), 81-85.

R.A. Kartini berasal dari Bandung; dan Kiai H. Hasyim Asyari dari Jombang.²²

Menurut keempat nama tersebut, tidak lama lagi akan ada berkat rahmat Allāh yang diturunkan kepada bangsa Indonesia, tepatnya pada hari Jumat Legi, tanggal sembilan bulan Ramadan 1364 H. Konon jika sampai proklamasi kemerdekaan terlewat dari tanggal tersebut, maka bangsa Indonesia harus menunggu lagi selama 350 tahun untuk menemukan tanggal baik yang serupa.²³

Di lain pihak, pada Jumat Kliwon, tanggal 12 Rajab 1364 H bertepatan 22 Juli 1945 ada Sembilan (9) orang tokoh yang melakukan pertemuan. Mereka terdiri dari empat orang tokoh Muslim yang berhaluan nasionalis, empat tokoh nasionalis yang beragama Islam dan seorang tokoh nasionalis Kristen. Pertemuan tersebut diselenggarakan bertujuan untuk merumuskan Undang-undang Dasar, yang sekarang dikenal sebagai UUD 1945. Dalam penyusunan UUD tersebut dimasukkanlah pesan 4 ulama' tasawuf sebagaimana di atas, ke dalam alenia ke tiga. Implementasi dari pesan-pesan tersebut memunculkan kalimat “atas berkat rahmat Allāh Yang Maha Kuasa sebagai salah satu bagian pembukaan UUD 1945. Siddiqiyah menilai bahwa dicantumkan beberapa ungkapan di atas telah menghadirkan pesan kepada seluruh manusia bahwa bangsa Indonesia tidak melupakan tiga (3) sumber utama yang menjadi landasan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan per tanggal 17 Agustus 1945.²⁴

Dari segi semantik penggunaan kata “berkat” sebelum “rahmat” pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-3 mempunyai maksud tersendiri. Mereka mensinyalir berkat merupakan satu karunia, restu dan pengaruh baik dari Tuhan yang menghadirkan kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup manusia. Implikasi lanjutannya adalah memunculkan penghormatan, belas kasih dan karunia. Segala macam penghormatan, belas kasih merupakan rahmat yang dalam perspektif Siddiqiyah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menyikapi hal ini, Siddiqiyah menyatakan beberapa alasan, di antaranya:

²² Billah, *17 Agustus 1945*, 62. Wady Sutikno et al., *Wali Songo Republik Indonesia* (Jombang: Al Ikhwan, 2009), 141-143.

²³ Sutikno et al., *Wali Songo*, 141-143.

²⁴ Ibid., 141.

Pertama, pembukaan Undang-undang Dasar 1945, semula bernama Piagam Jakarta, disusun oleh panitia kecil yang terdiri dari sembilan (9) orang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Dari kesembilan orang tersebut terdapat tiga ulama besar, yaitu: Kiai Abd. Kahar Mudzakkir dari Muhammadiyah; Kiai Abd. Wachid Hasyim dari unsur Nahdhatul ulama'; dan K.H. Agus Salim dari Syarikat Islam. Kehadiran ketiga nama tersebut, hemat Siddiqiyah, secara tidak langsung telah menjadi sejenis “*filter*” konseptual yang berperan meluruskan segala kemungkinan yang tidak benar. Kehadiran mereka telah menghindarkan dari kemungkinan terjadinya perubahan redaksi, seperti “atas rahmat berkat Allāh”. Sebagai ulama besar tentunya tidak mungkin membiarkan kesalahan terjadi, apalagi ini berkaitan dengan masalah seluruh bangsa Indonesia kedepannya. Dengan demikian, susunan kalimat tersebut, “atas berkat rahmat Allāh”, menurut ketiga ulama besar Indonesia tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’ān maupun Ḥadīth.

Kedua, Siddiqiyah berpedoman pada jumlah surat dalam al-Qur’ān yang berjumlah 114 surat. Menurut mereka kesemua surat selain surat al-Tawbah memakai pendahuluan, *bi ism Allāh al-Rahmān al-Rahīm*. Kalimat tersebut mulanya tersusun dari *ism Allāh al-Rahmān al-Rahīm*, dengan penambahan lafal *bi* (huruf *bā`*) di awal kata *ism*. Huruf *bā`* sebagai tambahan (*bā` zāidah*) menghadirkan makna baru, *barakah*. Pemaknaan ini merujuk pada keterangan pada surat al-Rahmān ayat ke-78, yang secara tegas menyatakan “*tabāraka ism Rabbik*”, yang terjemah bebasnya kurang lebih berkonotasi “maha *Barakah* nama Tuhanmu.”²⁵ Sehingga hadirnya huruf *bā`* sebagai tambahan telah menghadirkan makna baru, yaitu hadirnya *barakah*, sebelum penyebutan *ism Allāh* dengan sifat-Nya yang *al-Rahmān* (pengasih) *al-Rahīm* (penyayang). Artinya, Allāh menghadirkan *barakah* sebelum memunculkan kasih sayang-Nya kepada seluruh makhluk. Jadi secara ringkas dapat dinyatakan bahwa berkat harus muncul terlebih dahulu sebelum hadirnya rahmat. Oleh karenanya, bagi Siddiqiyah penggunaan kata “berkat rahmat” sebagai bagian awal dari pembukaan UUD 1945 sudah sangat Islami dan tepat secara konseptual.

Selain itu, selain penggunaan kalimat *bi ism Allāh al-Rahmān al-Rahīm* sebagai *muqaddimah* bagi hampir seluruh surat dalam al-Qur’ān, ungkapan tersebut juga dianjurkan oleh beberapa ḥadīth Nabi untuk

²⁵ Q.S. al-Rahmān: 78

dipergunakan dalam setiap permulaan amal. Hadirnya *barakah* ataupun berkat pada setiap aktivitas akan menandai ada tidaknya unsur manfaat dan nilai ibadah dalam setiap aktivitas tersebut. Selain itu, penyebutan *barakah* adalah cerminan harapan (niat) dari pelaku untuk memperoleh *barakah* dari Allāh. Alasan serupa yang menjadikan para cendekiawan Muslim terdahulu menghadirkan kalimat *bi ism Allāh al-Rahmān al-Rahīm* sebagai *muqaddimah* ayat suci. Dengan demikian, penyebutan “atas berkat rahmat Allāh” sebagai bagian dari pembukaan UUD 1945 sejatinya merupakan bentuk niat, doa dan harapan para pendiri bangsa agama Undang-undang Dasar bangsa Indonesia 1945 dapat mampu menghadirkan hukum dan nilai-nilai Islam dalam implementasinya di kemudian hari kelak.²⁶

Ketiga, kalimat “atas berkat rahmat Allāh” yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tepatnya alenia ke-3 juga merupakan kalimat sama yang dipergunakan untuk pernyataan kemerdekaannya bangsa Indonesia. Persoalannya, kenapa harus sama? atau kenapa kalimat “atas berkat rahmat Allāh” juga menjadi pernyataan awal dari deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Menyikapi persoalan semacam ini Ṣiddīqīyah dalam karya Wady Sutikno et al., *Wali Songo Republik Indonesia* menyatakan bahwa bangsa Indonesia mendapat nikmat kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan, yaitu pada hari Jumat Legi. Ṣiddīqīyah menghubungkan waktu deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan al-Qur’ān dan hadis Nabi, menurut mereka saat tersebut merupakan waktu yang penuh akan *barakah*.²⁷

Sutikno et al. menyebutkan lima alasan pendapat Ṣiddīqīyah mengenai tanggal baik tersebut. a) mereka mengutip ḥadīth Rasul yang menjelaskan bahwa ramadan merupakan bulan yang penuh berkat, “*ramadān shahr mubārak*”. b) bulan ramadan merupakan bulan diturunkannya al-Qur’ān, tepatnya tanggal 17 ramadan. Dalam hal ini ia mengutip surat al-An‘ām ayat ke-92, yang berbunyi “*wa hadhā kitāb anzalnāhu mubārak*”, dan surat al-Dukhān ayat ke-3 yang menyatakan bahwa “*sesungguhnya Aku menurunkan dia (al-Qur’ān) di malam barakah*”. c) menurut Ṣiddīqīyah, Muḥammad b. ‘Abd Allāh diangkat menjadi Rasul juga bertepatan dengan bulan ramadan, tepatnya tanggal 17. d) hari jum’at merupakan hari terpilih dan penuh akan kemulyaan, terlebih lagi jika hari itu jatuh pada bulan ramadan. Oleh

²⁶ Sutikno et al., *Wali Songo*, 144-147.

²⁷ *Ibid.*, 148-149.

karena itu, dipilihnya hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari jum'at bulan Ramadhan merupakan pilihan yang tepat sesuai waktu yang penuh barakah yang digambarkan oleh al-Qur'an dan hadith. Terlebih lagi alasan selanjutnya menunjukkan tanggal 17, e) bahwa umat Islam diwajibkan menunaikan salat sehari semalam sebanyak 17 *raka'at*. Jadi, berdasarkan tanggal, hari dan bulan dipilihnya Ramadan sebagai hari deklarasi dengan penuh keberkatan. Alasan ini pulalah yang menguatkan penggunaan istilah “atas berkat rahmat Allāh” sebagai pernyataan pembuka dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia sekaligus *muqaddimah* dari UUD 1945.²⁸

Melalui penjelasan tersebut Siddiqiyah seakan ingin menyatakan beberapa hal. *Pertama*, menegaskan tujuan bangsa Indonesia untuk mampu memahami bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu dicapai pada bulan yang penuh dengan *barakah*, tanggal dan harinya pun demikian. *Kedua*, sudah sepatutnya bangsa Indonesia tidak lupa bahwa kemerdekaan Indonesia itu hanya diperoleh dengan tiga hal, berkat dan rahmat Allāh serta keinginan luhur seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, ketiga hal tersebut juga dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang luhur budinya, bukan bangsa yang *takabbur* yang merasa seakan-akan kemerdekaannya dicapai hanya melalui usaha sendiri, tanpa pertolongan Tuhan. *Keempat*, bangsa Indonesia harus ingat dan sadar dengan butul bahwa kemerdekaan yang diraihnya merupakan takdir Tuhan yang dicapai melalui usaha bangsa Indonesia. Di sinilah letak pengakuan atas bertemunya takdir dan *ikhtiyar*. *Kelima*, dari itu semua bangsa Indonesia diharap mampu menjadi bangsa yang bersyukur dan mampu menghiasi kemerdekaannya dengan hal-hal yang bersesuaian dengan ketiga hal pokok tersebut.²⁹

Walisongo Republik Indonesia

Istilah Walisongo sangatlah populer di Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Biasanya sebutan “wali songo” itu hanya diberikan kepada individu dengan peran besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia sekitar abad ke-14 sampai 15 M. Ciri khas lainnya dari Walisongo adalah memiliki *karamah* atau kelebihan yang diberikan Allāh sebagaimana diberikan kepada para kekasih-Nya. Untuk mengetahui

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 151-152.

apa sebenarnya Walisongo yang dimaksud tarekat Ṣiddīqīyah, peneliti ingin coba menghadirkan beberapa persoalan yang melingkupi istilah wali terlebih dahulu, sebelum menjelaskan makna di balik penggunaan istilah Walisongo oleh tarekat Ṣiddīqīyah.

Secara leksikal lafal *al-walī* (wali) merupakan bahasa serapan dari istilah ‘Arab yang kurang lebih memiliki arti kedekatan (*al-qurb*). Di lain pihak kata ini juga dapat diartikan sebagai pengganti istilah yang menggambarkan turunnya air hujan, setelah hujan sebelumnya berlalu. Meskipun demikian, istilah ini jamak dipakai dengan konotasi orang yang mencintai, membenarkan dan menolong. Ibn Taymīyah hadir dengan makna lain, yaitu seseorang yang senantiasa mencinta sesuatu hal karena sebab tertentu dan membenci hal lain karena alasan serupa. Dalam kasus *walī Allāh*, sebab tersebut menurut Ibn Taymīyah adalah rida dan murka Allāh. Jadi wali Allāh adalah orang yang mencinta atau membenci suatu hal karena mengharap rida dan men menghindari murka Allāh.³⁰ Dengan demikian *walī Allāh* adalah seseorang yang selalu mengharap dan mencoba mendekat kepada Allāh. Ini memunculkan makna bahwa wali itu ibarat teman setia yang selalu ada dengan kita, sebaliknya lawan dari wali adalah ‘*aduw* (musuh).

Wali adalah orang yang senantiasa menyertai Allāh dengan menyesuaikan rida-Nya dengan rida Allāh dan mendekatkan diri pada-Nya dengan menjalankan perintah Allāh dengan ketaatan yang luar biasa. Pendapat lain mengenai arti wali disuguhkan Ibn al-Sikkit, ia mengartikan arti kata wali dengan cara menghadirkan dua kata lain yang berakar kata sama, *wilāyah* dan *walāyah* (keduanya berasal dari *w-l-y*). Menurutnya *wilāyah* merujuk kekuasaan, *walāyah* berarti pertolongan sementara itu *walī* berkonotasi sang pencipta. Selain itu ada juga beberapa pendapat lain, seperti yang dihadirkan oleh para imām tafsir seperti al-Ṭabārī, al-Zamakhsarī dan Fakr al-Dīn al-Rāzī, ketiga nama yang disebut terakhir berpendapat bahwa semua kata yang berakar dari kata *walī* mempunyai makna dekat. Orang yang menjadi *walī*, dalam artian penolong, bagi setiap sesuatu, maka secara harfiah ia dekat dengannya. Meskipun demikian, mengartikan *walī Allāh* sebagai dekat dengan Allāh dalam makna tempat maupun jarak adalah satu kesalahan. Kedekatan dalam arti terakhir adalah dekat dalam makna mempunyai pelbagai sifat yang mencerminkan ketakwaan serta keimanan yang kuat dan benar. Jika seorang hamba telah dekat

³⁰ Lilik Mursito, “Wali Allah Menurut al-Hakim dan Ibn Taymīyah”, *Jurnal Kalimah*, vol. 13, no. 2, (September 2015), 343.

dengan Allāh karena melakukan ibadah secara ikhlas terlebih lagi jika Allāh membalas kedekatannya itu dengan sayang dan kebbaikannya, maka dalam keadaan ini derajat *wali* telah dicapainya.

Wali dengan artian dekat inilah yang lebih dominan dalam dunia sufistik. al-Qushayrī menyebutkan dua makna wali: *pertama*, orang yang senantiasa menjadi objek (*maf'ūl*) Allāh. Ia adalah orang yang senantiasa dijaga Allāh. Allāh menjaga dan memberinya *tanfīq* agar dia taat kepada-Nya setiap waktu. *Kedua*, orang yang senantiasa menjadi *fa'il* (dalam arti subjek) yang melakukan sesuatu dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Artinya, ia melakukan ibadah dan ketaatan dengan sangat baik. Ketaatan dilakukan secara simultan dan terus-menerus, tanpa disisipi dengan perbuatan maksiat. Dengan demikian yang dimaksud di sini adalah kewalisan dalam artian senantiasa sibuk dan dekat dengan Allāh melalui aktivitas ibadah.³¹

Selain berpendapat tentang definisi, Ibn Taymīyah juga menghadirkan pendapatnya tentang karakteristik wali Allāh. Menurutnya, seorang wali mempunyai tiga karakteristik: beriman dan takwa kepada Allāh; membenci dan mencintai karena Allāh; dan penuh loyalitas dalam ketaatan kepada Allāh. Dalam perspektif Ibn Taymīyah, karakteristik yang lebih ditonjolkan adalah dari aspek kebatinan.³² Adapun seseorang disebut wali karena: Allāh senantiasa mengurus urusannya dan ia melaksanakan ibadah secara terus-menerus.³³

Penggunaan istilah Walisongo pada tarekat Siddiqiyah memiliki konotasi yang berbeda dengan apa yang lazim umumnya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kata ini dipergunakan untuk mendeskripsikan panitia 9 penyusun Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu, penyebutannya pun berbeda, lengkapnya Walisongo Republik Indonesia. Kesembilan nama tersebut beranggotakan: Soekarno (w. 1970); Mohammad Hatta (w. 1980); Mohammad Yamin (w. 1962); Ahmad Subardjo (w. 1978); A. Maramis (w. 1977) seorang tokoh Kristen; Kiai Abdul Kahar Muzakkir (w. 1973) wakil dari Muhammadiyah; Abi Kusno Tjokrosujoso (w. 1968) tokoh Muhammadiyah; Kiai Wachid Hasyim (w. 1953) tokoh Islam

³¹ Ibid., 409.

³² Mursito, "Wali Allah", 345.

³³ Ibid., 346.

Nahdlatul Ulama' (NU); dan H. Agus Salim (w. 1954) dari Syarikat Islam.³⁴

17 Agustus 1945 adalah Kemerdekaan Bangsa Bukan Negara Indonesia

Salah satu poin penting dalam pemahaman konsep nasionalisme dari tarekat *Ṣiddīqiyah* adalah gagasan mereka tentang tanggal berdirinya Negara Republik Indonesia. Jika mayoritas pendudukan Indonesia saat ini menilai bahwa tanggal deklarasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno merupakan tanggal yang sama dengan tanggal awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak demikian dengan tarekat *Ṣiddīqiyah*. Tarekat tersebut memiliki anggapan yang berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia. Baginya tanggal terbentuknya NKRI adalah tanggal 18 Agustus 1945. Tanggal yang bertepatan dengan penetapan UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Dalam menyikapi diskusi tentang persoalan ini Muntashir Billah melalui karyanya *17 Agustus 1945 Bukan Kemerdekaan Republik Indonesia* melontarkan beberapa pertanyaan, di antaranya: Kapan datangnya nikmat kemerdekaan itu? Apakah hakikat kemerdekaan itu? Apakah sebabnya kita bisa merdeka? Apakah sebabnya kita bisa kehilangan kemerdekaan? Apakah nilai kemerdekaan itu? Untuk apa kita merdeka? Apakah kewajiban-kewajiban terhadap kemerdekaan itu?³⁶ Jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut barangkali telah kita temukan pada bahasan hakikat kemerdekaan di atas. Hemat peneliti, meskipun demikian setidaknya masih ada satu pertanyaan yang menyisakan persoalan tersendiri, kemerdekaan apakah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus itu?

Jawaban *Ṣiddīqiyah* tentang pertanyaan ini dapat kita temukan dalam penjelasan Muntashir Billah. Menurutnya untuk memperoleh jawaban yang paling tepat seharusnya setiap penanya harus merujuk kembali kepada teks proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam proses pembacaan ini Billah menekankan satu kunci utama, yang lagi-lagi dalam bentuk pertanyaan yang kurang lebihnya berkonotasi jika dibaca dari atas ke bawah dan sebaliknya, dari bawah ke atas apakah ada kata-kata republik Indonesia disebutkan dalam

³⁴ Sutikno et al., *Wali Songo*, 2, 152.

³⁵ Billah, *17 Agustus 1945*, 3-4.

³⁶ *Ibid.*, vi.

teks proklamasi yang dibaca tersebut.³⁷ Menurutnya, teks proklamasi kemerdekaan merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia yang secara tegas telah menjawab persoalan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dilahirkan bersamaan dengan dibacanya teks tersebut.

Teks proklamasi tersebut secara tidak langsung telah menjadi dokumen yang memperingatkan seluruh bangsa Indonesia bahwa yang merdeka saat itu bukanlah Negara Indonesia, tetapi bangsa Indonesia. Bangsa tidak sama dengan Negara. Bangsa adalah satu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, Bahasa maupun sejarah hidup yang sama. Bangsa juga dapat diartikan sebagai golongan manusia, binatang atau tumbuhan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama. Di lain pihak Negara adalah satu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Ia juga dapat diartikan sebagai satu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang terorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional maupun kepentingannya tersendiri.³⁸

Dengan pengertian Billah menganggap aneh banyaknya surat kabar, kantor, kampung, masjid istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah dan tempat-tempat lain ditulis yang menulis ungkapan dirgahayu kemerdekaan “Republik” Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus, kalimat tersebut menurut Billah harusnya bertuliskan dirgahayu kemerdekaan “Bangsa” Indonesia. Kesalahan semacam ini menurutnya tidak perlu terjadi seandainya seluruh rakyat Indonesia benar-benar memahami teks proklamasi kemerdekaan. Ia mensinyalir bahwa kebanyakan mereka yang tidak paham akan hal ini jika ditanya akan menjawab bahwa itu adalah kebijakan dari atasan, dalam hal ini pemerintah pusat. Billah menyesalkan hal tersebut dengan pertanyaan yang bernada sanggahan, “apakah kalau dari atas sudah pasti benar? Belum tentu”. Menurutnya tidak penting apa yang dikatakan atau diinstruksikan oleh atasan, namun yang lebih penting adalah apa yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia di kelas *grass root*. Billah bahkan mempermissalkan hal ini dengan pengibaratan,

³⁷ Ibid., 1-4.

³⁸ Ibid., 5-8.

yang mempertanyakan mana yang lebih penting antara kaki di bawah atau alis yang ada di bagian tubuh atas?³⁹

Selain itu Siddiqiyah juga menyangsikan tanggal kemerdekaan sebagai hari jadi NKRI. Dalam hal ini mereka mempersoalkan jika seandainya tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka yang dijajah selama 353.5 tahun itu bukan bangsa Indonesia tetapi Negara Republik Indonesia. Jika yang dijajah oleh Belanda lebih dari 350 tahun adalah Republik Indonesia, maka kapan sejatinya Republik Indonesia mulai terbentuk? Jika tanggal 17 Agustus itu yang merdeka adalah Republik Indonesia dan bukan Bangsa Indonesia, maka sampai sekarang Bangsa Indonesia belum merdeka, sebab yang merdeka Negara Republik Indonesia. Beberapa ungkapan tersebut berulang kali dilontarkan oleh para pengikut tarekat Siddiqiyah, secara lisan maupun tertulis dalam beberapa kesempatan.⁴⁰ Selain menolak tanggal 17 Agustus sebagai hari lahirnya NKRI, inti dari seluruh ungkapan tersebut adalah pernyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, terutama para pelaksana sekaligus pembuat kebijakan bertingkah seperti “*ndoro-ndoro*”, dan di lain pihak masyarakat diperlakukan seperti bawahan.

Mendapati kenyataan yang seperti itu, Siddiqiyah berkesimpulan bahwa ilmu yang dimiliki oleh masyarakat belumlah menjelma menjadi sikap arif (bijaksana). Hukum-hukum yang dilahirkan dan berjalan pun belum mampu memunculkan satu keadilan yang hakiki. Dampaknya setiap usaha menyatukan pelbagai golongan tidak mampu melahirkan kekokohan yang solid. Terlebih lagi para penguasa melalui segala kebijakan yang mereka lahirkan tidak dapat memimpin dengan baik, menunjukkan hal yang benar, mengayomi hidup rakyatnya dan belum mampu dijadikan teladan yang dapat “*diguji*” dan ditiru. Intinya

Terlepas dari segala persoalan di atas, apa yang ingin disampaikan oleh Siddiqiyah bahwa memang bangsa Indonesia sudah merdeka, namun Negara Kesatuan Republik Indonesia belum tentu telah merdeka. Negara ini masih dalam proses untuk memerdekakan diri dari segala belenggu penjajahan yang berupa fanatisme golongan, kedangkalan ilmu, moral, etika, minimnya toleransi, tingginya individualisme, kurangnya teladan dan kebijaksanaan yang masih sangat minim. Sebelum bangsa Indonesia dapat menjelma menjadi

³⁹ Ibid., 65-66.

⁴⁰ Ibid., 3, 65-66, 100.

bangsa yang bermartabat, maka selama itu pula Negara ini tidak akan mendapatkan kemerdekaan dari pelbagai “penjajahan” yang menyimpannya.

Salah satu permasalahan utama dari bangsa Indonesia adalah kesalahan mereka dalam memahami sejarah bangsa dan Negeranya. Pada tanggal 17 Agustus Negara Republik Indonesia belum ada, oleh karena itu segala macam peringatan yang ditujukan atasnya merupakan usaha yang tidak tepat. Ini merupakan penyelewengan sejarah. Menurut *Ṣiddīqīyah*, sumbernya jelas, yaitu teks proklamasi. Kalau memang masih berpedoman bahwa tanggal 17 Agustus merupakan kemerdekaan Republik Indonesia ia akan mempersoalkan apa dasar dari NKRI saat itu? Jika dijawab Pancasila, mereka akan berkelit bahwa pada saat itu rumusan Pancasila belum final hingga menjadi dasar Negara.

Pertanyaan, selanjutnya berkisaran pada siapa yang mendirikan NKRI? Apakah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan jumlah pesertanya sebanyak 27 orang. Terlebih lagi, pada tanggal 17 Agustus 1945 PPKI belum sidang, sebab sidang baru terlaksana pada tanggal 18 Agustus 1945. Artinya pada tanggal 17 Agustus NKRI belum terbentuk, dan oleh karena belum ada eksistensinya mana mungkin terjadi pemindahan kekuasaan padahal (Negara) yang dikuasai belum didirikan. Jika dijawab pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada pemerintah Indonesia, maka hal ini pun mustahil dilakukan, sebab pemerintahan Indonesia saat itu masih belum terbentuk. Oleh karena itu semua, jawaban yang paling mungkin saat itu adalah tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia belum terbentuk terlebih lagi belum merdeka, sebab yang merdeka adalah bangsa Indonesia. Bangsa yang berdaulat dengan kesatuan tujuan utama, kemerdekaan dari penjajahan. Bangsa yang merdeka inilah yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bersepakat untuk membentuk satu kesatuan hukum, norma dan pemerintahan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan UUD 1945 menjadi basis hukumnya, dan presiden beserta wakilnya sebagai penyelenggara Negara tersebut.

Dari keterangan di atas, setidaknya kita dapati tiga ide pokok yang ingin disampaikan oleh tarekat *Ṣiddīqīyah*. *Pertama*, tanggal 17 Agustus 1945 yang merdeka adalah bangsa Indonesia, yang saat itu belum memiliki bentuk Negara. Tanggal 18 Agustus 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi telah lahir dan

dibentuk oleh bangsa yang telah merdeka satu hari sebelumnya, yaitu bangsa Indonesia. *Kedua*, makna kemerdekaan ada dua. Kemerdekaan dari penjajahan secara fisik dan psikis. Secara fisik bangsa Indonesia telah sepenuhnya mampu merdeka dari penjajahan kaum imperialis, berbeda keadaannya dengan kemerdekaan psikis. Sebab meskipun secara fisik, infrastruktur maupun bentuk kenegaraan Indonesia telah merdeka dan terbebas dari kekuasaan negara lain, namun psikis warga Negaranya terkadang masih berada dalam bayang-bayang penjajahan. Oleh karena itu, memerdekakan psikis merupakan pekerjaan rumah sepanjang hayat bagi setiap bangsa Indonesia yang mengaku telah merdeka. *Ketiga*, teks proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno merupakan bukti nyata dari kesimpulan pertama.

Ijtihad Politik Tarekat Ṣiddīqīyah

Berbicara mengenai dunia tarekat sufistik tidak mungkin untuk berlepas diri dari perbincangan tentang mursyid. Mursyid atau pemimpin tarekat sejatinya memiliki posisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan segala pengambilan kebijakan dari suatu tarekat, tidak terkecuali Ṣiddīqīyah. Ketika seorang mursyid sebagai individu yang diyakini mampu menunjukkan jalan yang benar untuk berbakti kepada Tuhan telah mengambil suatu ketetapan, maka keputusan tersebut haruslah diterima oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang sakral, tentunya karena ada kepercayaan bahwa ia selalu berada dalam bimbingan dari Tuhan. Sebagaimana ungkap Imām al-Qashanī, syekh atau mursyid secara definitif ialah “seseorang yang telah menguasai tahap kesempurnaan dalam trilogi disiplin keilmuan: *sharī‘ah*, *ṭarīqat* dan *ḥakikat*, sangat pakar dalam mengetahui seluk beluk nafsu dan penyakit-penyakitnya, berikut cara penanggulangan dan penyembuhannya.”⁴¹

Dengan kepakaran dalam trilogi ilmu ini, seorang mursyid bisa memberikan jawaban-jawaban atau solusi berkenaan dengan masalah *tanḥīd*, *fiqh* maupun penyucian yang dihadapi murid.⁴² Selain kepakaran dalam tiga ilmu, ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi. *Pertama*, pandangan rohani yang jelas (*dẓawq*

⁴¹ ‘Abd al-Razzāq al-Qāshānī, *Istīlāḥāt al-Ṣūfiyah*, ed: Kamar Ibrāhīm Ja`far (Kairo: Hai`ah ‘Āmmah al-Miṣriyah, 1981), 154. Aḥmad al-Naqṣabandī, *Kitāb Jami’ al-Uṣūl fi al-‘Amliyah* (Mesir: Maṭba‘ah Wahbīyah, 1298 H), 87.

⁴² Abū al-Ḥusayn Muslim b. al-Hajjāj al-Qushayrī, *Al-Risālah al-Qushairīyah fi ‘Ilm al-Taṣawwuf* (Mesir: Maṭba‘ah al-Adabīyah, 1319 H), 90.

.*sarib*). *Kedua*, pengetahuan yang benar (*ilm.sahib*). *Ketiga*, Cita-cita yang tinggi (*himmah 'aliyah*). *Keempat*, kondisi jiwa yang diridai (*halah mardiyah*). *Kelima*, mata batin yang tajam (*bas'rah naqidah*). Kelima syarat ini memberikan pengertian bahwa ada lima hal lain lagi sebagai lawan dari hal tersebut yang menjadikan seseorang gugur dan tidak bersertifikasi sebagai mursyid. Di antaranya adalah; *pertama*, bodoh dalam urusan agama (*jahl bi al-din*). *Kedua*, menjatuhkan kehormatan orang Islam (*isqat hurmat al-muslimin*). *Ketiga*, berkecimpung dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. *Keempat*, mengikuti hawa nafsu. *Kelima*, berperangai buruk.⁴³

Seorang mursyid juga dituntut untuk selalu menjaga hati dari sifat takabur dan membanggakan diri sendiri dengan kedudukan mursyid yang dimiliki. Apalagi dengan meningkatnya jumlah murid dan orang-orang yang berdatangan untuk meminta bimbingan. Dalam hal ini, Imām 'Abd. Al-Wahhāb al-Sha'rānī mengungkapkan: pakaian, hiasan, perangai (*ẓāhir*) sufi, menghadiri berbagai pertemuan tidaklah cukup. Ketika kepercayaan dan bertambahnya banyaknya murid yang ikut, nafsunya berkata: "Engkau adalah (tokoh) kebaikan besar". Dengan banyaknya pengikut ia tertipu bahkan memuji Allāh. Ketika jumlah pengikut dan muridnya menurun, (secara diam-diam) ada perasaan benci kepada Allāh. Seharusnya dia tidak memperdulikan hal itu atau hal-hal sejenisnya. Sikap seorang *faqīr* adalah selalu menghadapkan jiwa kepada Allāh secara *ẓāhir* dan *bātin* dengan berbagai bentuk pendekatan dan ibadah.⁴⁴

Tujuan adanya berbagai kompetensi dan adab yang harus dipenuhi mursyid adalah untuk menjaga autentisitas ilmu tasawuf agar tidak menyimpang dari aturan-aturan dalam ilmu syariat dan hakikat. Ini karena dijumpai adanya, sufi *jāhil* yang melakukan kesalahan fatal dalam aktivitas bertasawuf, seperti menggugurkan ibadah-ibadah *ẓāhir*, mengeluarkan kata-kata yang menjurus kepada syirik. Seandainya kelompok sufi ini mempunyai pengikut dan mendirikan '*ẓawriyah*' tentu akan membuat citra buruk tasawuf. Jika seorang murid menjumpai berbagai bentuk penyelewengan semacam ini, maka seorang murid bisa meninggalkan sang mursyid dan mencari guru yang lebih berkompeten.⁴⁵

⁴³ Al-Naqṣabandī, *Kitāb Jāmi'*, 15.

⁴⁴ 'Abd Wahhāb al-Sha'rānī, *al-Anwār al-Qudsīyah fī Ma'rifat Qawā'id al-Ṣūfiyah*, ed: Tāha 'Abd al-Baqī Surūr, vol. 11 (Bayrūt: Maktabah al-Ma'ārif, 1962), 33.

⁴⁵ Al-Qushayrī, *Al-Risālah al-Qushairiyah*, 90.

Karisma kepemimpinan seorang mursyid bernilai sangat tinggi, bahkan melampaui para pemimpin ataupun elite lokal, tradisional maupun pemimpin formal lain. Bagi murid, keyakinan semacam ini pasti mengandung hikmah, yang tentunya hanya diketahui oleh para mursyid. Selain itu, besarnya peranan mursyid terhadap murid sangat wajar apabila berdampak atas besarnya perhatian para elite politik maupun pemerintah untuk berlomba-lomba dalam mengambil hati para mursyid tersebut. Ini dilakukan karena dengan memperoleh dukungan mursyid maka suatu kelompok organisasi akan secara tidak langsung mendapatkan suara para murid tarekat itu. Oleh karena segala aktivitasnya yang sangat berpengaruh, seorang mursyid harus mampu mengambil ijtihādnya sendiri, tidak terkecuali dalam persoalan politik.

Tarekat Ṣiddīqīyah pernah mensinyalir bahwa salah satu partai politik di masa Orde Baru (Golongan Karya) sebagai salah satu partai yang perlu didukung. Ia dinilai mampu membawa Bangsa Indonesia kepada ketentraman, keamanan dan sangat *responsive* terhadap pelbagai persoalan yang dihadapi umat Muslim di Indonesia. Indikatornya, minimnya gangguan yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Dengan alasan ini, selama masa pemerintahan Orde Baru tarekat Ṣiddīqīyah ikut bernaung dan memperjuangkan partai politik tersebut.

Berafiliasinya tarekat Ṣiddīqīyah kepada partai Golongan Karya di era Orde Baru tidak serta-merta menjadikan tarekat ini mendapatkan pelbagai imbalan yang besar. Meskipun Ṣiddīqīyah telah ikut memperjuangkan partai berlambang pohon beringin ini, namun sebagaimana divisualkan oleh Nurcholish Madjid dalam karyanya *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, bahwa tarekat ini tidak pernah diberikan kesempatan untuk memangku jabatan penting dalam dunia perpolitikan Indonesia. Tidak seperti tarekat lain, sebut saja tarekat Qadīriyah wa Naqṣābandīyah, melalui KH. Hasyim Asy'ari yang berasal dari Tebuireng, KH. Wahab Hasbullah dari Tambak Beras serta KH. Bisri Syamsuri dari Denanyar. Ketiga nama disebut terakhir merupakan *Ra'īs 'Am* (Pimpinan Umum) dari organisasi kemasyarakatan yang cukup berpengaruh di Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU). Selain mereka ada juga nama-nama semisal KH. Wahib Wahab (Tambak Beras) dan KH. Abdul Wahid Hasyim (Tebuireng)

yang berkecimpung dalam dunia birokrasi pemerintahan di Indonesia.⁴⁶

Persoalan jabatan dalam organisasi tidak menjadi satu-satunya hal yang tampaknya dialami oleh tarekat *Ṣiddīqīyah*. Sebagai salah satu tarekat dengan massa yang cukup banyak yang setiap mendukung salah satu partai penguasa pemerintahan saat itu, tarekat ini juga tampaknya agak tersisihkan dalam urusan penerimaan bantuan dari pemerintah. Hal ini setidaknya ditunjukkan dengan minimnya, untuk menghindari penyebutan tidak ada, bantuan bersifat material yang diterimanya. Jika beberapa lembaga lain telah menerima bantuan semisal dalam bentuk gedung sekolah, bantuan dana maupun aspek fisik lainnya, tarekat ini tampaknya masih jauh dari itu semua. Dengan minimnya timbal balik yang diperoleh tarekat ini, *Ṣiddīqīyah* tidak serta-merta menuntut untuk memperoleh hak yang sama seperti organisasi lain. Dukungan mereka kepada pemerintah dilakukan sebagai bentuk bakti mereka kepada tanah air, bangsa dan Negara Indonesia. Alasan lainnya, adalah Golongan Karya dinilai oleh *Ṣiddīqīyah* tidak pernah berusaha untuk mempersoalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, terutama pasal ke-29 yang berkaitan dengan Pancasila pertama. Keduanya menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa.”

Salah satu hal yang menarik dari dukungan tarekat *Ṣiddīqīyah* kepada partai Golongan Karya adalah pengesampingan partai lain, bahkan partai yang mengusung jargon Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Indikasi yang paling kentara adalah perubahan jumlah suara yang diperoleh partai yang disebut terakhir dibandingkan partai Golongan Karya di Jombang pada pemilihan umum (pemilu) pada tahun 1977 dan 1982. Pada tahun 1977 PPP memperoleh suara sekitar 40% namun pada pemilu empat tahun setelahnya, tahun 1982 suara mereka turun menjadi 25% saja. Ini terjadi disinyalir oleh Hilmy Mukhtar, dalam tesisnya *Dinamika NU: Suatu Studi tentang Elite Kekuatan Politik Islam di Jombang Jawa Timur* karena terjadi perpindahan dukungan *Ṣiddīqīyah* dari PPP kepada Golongan Karya. Bahkan dalam karya yang sama, Mukhtar menilai bahwa para elit *Ṣiddīqīyah* telah menginstruksikan para pengikutnya agar memberikan dukungannya kepada partai yang disebut terakhir di mana pun mereka berada. Dengan kenyataan semacam ini, tentunya menjadi wajar jika

⁴⁶ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 81.

sebagai partai mayoritas di pemerintahan, Golongan Karya selalu memperoleh suara mayoritas di Kabupaten Jombang.⁴⁷

Dari segi pendapat perpolitikan, gagasan Siddiqiyah tercermin dari penjelasan Kiai Muhammad Muchtar Mu'thi. Mengenai Pancasila, menurut nama tersebut, jika sila pertama ditambah dengan tujuh kata, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta, maka hal ini akan menimbulkan pelbagai persoalan pelik di kemudian hari. Persoalan yang terbesar menurut Mu'thi adalah terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia, utamanya yang berkeyakinan selain Islam. Gagasan ini dilandasi oleh pandangan bahwa dalam deklarasi kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, disebutkan bahwa yang merdeka adalah seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bukan umat Islam Indonesia saja. Padahal bangsa Indonesia terdiri dari pelbagai etnis, suku dan kebudayaan yang sangat beragam. Seandainya ketujuh term tersebut tetap dipertahankan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidakadilan bagi mereka yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya.⁴⁸

Dalam menyokong pandangannya tentang penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, Siddiqiyah mengutip beberapa alasan. Salah satunya adalah *ḥadīth* Nabi yang menjelaskan bahwa “suatu ketika akan datang masa di mana tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali hanya namanya saja”, “*ya'ti zaman la yabqa min al-Islam illa ismuhu*”. Apa yang dimaui oleh Siddiqiyah dengan mengutip *ḥadīth* tersebut adalah jika Indonesia memaksakan penggunaan ketujuh kata dalam Piagam Jakarta sebagai ganti Pancasila, sila pertama, maka hal ini akan otomatis menjadi landasan mendasar dari segala hukum di Indonesia. Persoalannya akan muncul manakala Islam menjadi dasar Negara namun penduduknya masih banyak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Dalam kondisi semacam ini, mengidentifikasi berlakunya ungkapan Nabi di atas Islam hanya tersisa namanya saja, tidak dengan ajaran dan nilai-nilainya di dalam diri masyarakat Muslim.⁴⁹

⁴⁷ Hilmy Mukhtar, “Dinamika NU: Suatu Studi tentang Elite Kekuatan Politik Islam di Jombang Jawa Timur” (Tesis—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989), 156.

⁴⁸ Mochammad Muchtar Mu'thi, *Menyingkap Kegelapan Hati* (Jombang: Al Ikhwan, 2002), 41.

⁴⁹ Ibid.

Alasan lain yang dikemukakan oleh Muhammad Muchtar Mu'thi adalah jika ketujuh kata tersebut dipergunakan sebagai sila pertama, maka negara akan memaksakan implementasi syariat Islam. Persoalan yang dikemukakan Mu'thi adalah masalah niat. Ia berpendapat bahwa pemaksaan penerapan syariat oleh negara menjadikan tujuan utama dari implementasi hukum Islam bukan lagi karena Allāh, tetapi karena sebatas kewajiban berbangsa dan bernegara. Salat yang semestinya dijalankan karena mengharap rida Allāh, karena ditekan oleh negara akan menjadi kewajiban negara. Dampaknya akan terjadi perubahan niat dalam pelbagai aktivitas ibadah seorang Muslim, bukan lagi *li Allah* tapi *li Republik Indonesia*. Ini berlaku bagi segala macam ibadah dalam Islam. Jika ini terjadi, hemat Mu'thi, maka akan terjadi kesirikan yang terorganisir dan didukung oleh kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Selain itu, bagi Mu'thi sudah seharusnya umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia untuk bersyukur atas betapa luar biasanya para *founding father* bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila secara ringkas, pada dan berisi terlebih lagi tidak ada unsur-unsur tertentu yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, terlebih lagi tidak didapatinya kemungkinan terjadinya kesirikan.⁵⁰

Dukungan kepada partai pendukung pemerintahan tidak berakhir dengan berakhirnya era keemasan Golongan Karya. Pada sekitaran tahun 1998 di mana terjadi peralihan pemerintahan dari Orde Baru menuju era Reformasi telah mengakibatkan perubahan dukungan politik tarekat *Siddiqiyah*. Jika di era Orde Baru dukungan mereka kepada Golongan Karya sangat terlihat nyata, maka di era Reformasi *Siddiqiyah* mencabut dukungannya atas Golongan Karya. Penarikan dukungan ini disinyalir sebagai bentuk perubahan ijtihad mursyid tarekat tersebut yang di era ini tidak lagi memandang Golongan Karya Mampu memerintah negeri ini dengan baik.

Era Reformasi dicirikan dengan lahirnya pelbagai macam partai politik peserta pemilu. Partai-partai ini muncul dengan pelbagai model ideologi, sebut saja ideologi agamis dan nasionalis. Kelahiran varian partai politik ini disebabkan oleh perubahan undang-undang tentang pemilihan umum yang memperbolehkan kepada siapa saja untuk mendirikan partai politik selama memenuhi pelbagai persyaratan. Keengganan *Siddiqiyah* untuk mendukung Golongan Karya seperti yang mereka lakukan sebelumnya, tidak hanya dilatarbelakangi oleh munculnya pelbagai partai politik baru, namun

⁵⁰ Ibid.

karena Golongan Karya sendiri dinilai telah banyak mendapatkan protes dan tidak lagi mampu mempertahankan pemerintahan dengan baik, ditandai dengan munculnya pelbagai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Selain pelbagai persoalan yang melanda partai berlambang pohon beringin tersebut, *Ṣiddīqiyah* memandang dengan banyaknya partai yang muncul barang tentu akan melahirkan perbedaan pandangan, yang secara tidak langsung akan menegasikan “mayoritas tunggal”. Ini karena setiap partai mempunyai visi dan misinya masing-masing, artinya setiap partai memiliki kepentingannya tersendiri. Variasi tujuan ini tentunya tidak menutup kemungkinan untuk munculnya misi yang berbeda bahkan bertentangan dengan misi tarekat *Ṣiddīqiyah* yang mengedepankan dakwah Islam.

Ciri khas era reformasi dengan dengan kebebasannya tidak berarti wewenang mursyid tarekat *Ṣiddīqiyah* untuk mengarahkan pengikutnya agar berafiliasi kepada partai tertentu menjadi terkooptasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketaatan kepada mursyid bagi seorang murid wajib hukumnya, hal ini juga berlaku dalam pilihan politik. Meskipun demikian, suara *Ṣiddīqiyah* tampaknya tidak selantang sebelumnya dalam mendukung satu partai politik tertentu. Ini ditengarai oleh pendapat mursyid *Ṣiddīqiyah* yang menilai bahwa tidak ada satu partai tertentu yang perlu didukung sepenuh hati. Hal inilah yang tampaknya melatarbelakangi dari ketiadaan instruksi khusus dari mursyid *Ṣiddīqiyah* untuk berafiliasi kepada satu partai seperti halnya kepada Golongan Karya pada era Orde Baru. Dengan kata lain, pasca era Reformasi *Ṣiddīqiyah* telah membebaskan pengikutnya untuk menjatuhkan pilihan politiknya kepada salah satu partai yang dinilai baik.⁵¹

Ijtihad tarekat *Ṣiddīqiyah* dalam persoalan perpolitikan sebagaimana disebut di atas menunjukkan bahwa sebagai gerakan tasawuf, tarekat tidak melulu mengedepankan asketisisme. Perhatian *Ṣiddīqiyah* terhadap dunia politik dan pemerintahan tidak melulu dilakukan dengan mendukung satu partai politik tertentu. Salah satu yang paling jelas diperlihatkan oleh tarekat ini salah satunya dapat dijumpai pada tahun 2002 yang kala itu mereka menyelenggarakan doa bersama menjelang sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sidang tersebut dibahas persoalan yang berkaitan dengan

⁵¹ *Majalah al-Kautsar: Jendela Shiddiqiyah*, vol. 10 (2004), 4.

amandemen UUD 1945 utamanya berkaitan dengan Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002), sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006. Tujuan utama diadakannya doa bersama tersebut adalah adanya kekhawatiran tarekat *Ṣiddīqīyah* akan terjadinya amandemen UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Meskipun sejatinya *Ṣiddīqīyah* tidak menunjukkan resistansi terhadap segala macam keputusan MPR, selama tidak mempersoalkan pasal tersebut, mereka tetap bersikukuh untuk menolak penggunaan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sebagai ganti salah satu sila dalam Pancasila. Ini karena menurut mursyid *Ṣiddīqīyah* rumusan Pancasila dan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 sudah final, tidak menerima perubahan dan harus dipertahankan.

Apa yang dilakukan oleh *Ṣiddīqīyah* berkenaan dengan dunia perpolitikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menjadi satu ilustrasi menarik. Dunia tarekat tidak melulu berbicara tentang ruang elite yang hanya dapat dimasuki oleh individu tertentu yang merasa jenuh atas fenomena yang terjadi di dunia, terlebih lagi persoalan politik. Tarekat juga membicarakan ruang bebas berpolitik dengan saling berbagi dan memberi. Realita semacam ini melahirkan pandangan bahwa keterlibatan tarekat juga relatif besar dalam persoalan duniawi, politik.⁵² Artinya apa yang ingin didakwakan tarekat ini adalah satu bentuk pembumian nilai-nilai sufistik, mereka tidak kolot, kaku dan menolak segala dinamika kemajuan dan perkembangan manusia dengan segala persoalannya. Bahkan mereka terlibat aktif dalam usaha transformasi nilai-nilai sosial-politik lokal maupun global dengan berfondasikan ajaran Islam.

Terlepas dari adanya kecenderungan *Ṣiddīqīyah* untuk mengikut partai penguasa pemerintahan di Indonesia, apa yang mereka lakukan menunjukkan partisipasi aktif dalam persoalan politik bangsa Indonesia. Yang menarik, bentuk peran serta *Ṣiddīqīyah* tidak mengharuskan mereka menjadi bagian dari organisasi pemangku kekuasaan maupun sebagai pihak yang mendapatkan imbalan dari pihak yang didukungnya. Tidak hanya itu, apa yang dilakukan *Ṣiddīqīyah* mencitrakan bahwa keikutsertaan dan dukungan mereka dalam pemilihan umum dilakukan sebagai partisipasi mereka dalam

⁵² Yunasril Ali, *Sufisme dan Pluralisme: Memahami Hakikat Agama dan Relasi Agama-Agama*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), vii.

mendukung kebijakan pemerintah. Jika di era Orde Baru, tarekat ini berafiliasi pada Golongan Karya yang dinilainya memiliki peran besar dalam pemerintahan, maka pada era pasca Reformasi mereka lebih bersikap netral, dalam artian tidak menunjukkan satu bentuk dukungan pada satu elite politik tertentu.

Catatan Akhir

Dari diskusi di atas dapat dikatakan bahwa kehadiran tarekat *Ṣiddīqīyah* sangat erat kaitannya dengan peran sentral kiai Muhammad Muchtar Mu'thi. Meskipun dinisbahkan kepada al-*Ṣiddīq*, julukan sahabat Abū Bakr, sejatinya sanad tarekat tersebut hanya sampai pada keturunannya dan akhir silsilahnya justru berpangkal pada 'Alī b. Abī Ṭālib. Terlepas dari itu, dalam perkembangannya meskipun sempat dinyatakan sebagai tarekat *ghayr al-mu'tabarab*, *Ṣiddīqīyah* secara perlahan mampu mengambil hati masyarakat. Metode dakwah yang diusung pun cenderung unik, yaitu pengedepanan unsur-unsur sufistik-nasionalistik, di atas aspek-aspek syariat yang dinilai *rigid*.

Selain itu, secara konseptual *Ṣiddīqīyah* menilai kemerdekaan bangsa Indonesia adalah *barakah*. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu *Ṣiddīqīyah* menawarkan konsep *Walisongo* Republik Indonesia yang terdiri dari sembilan anggota panitia penyusun Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu ijtihad politik yang dilakukan tarekat ini sebagai usaha mendukung pengisian kemerdekaan dengan nilai-nilai Islami, meskipun tanpa disertai dengan penggunaan Islam sebagai dasar negara. Dengan menekankan pentingnya cinta tanah air, sebagai salah satu inti ajaran yang didakwahkan, *Ṣiddīqīyah* berusaha mengangkat arus baru dalam bertasawuf, yaitu *al-tasawwuf al-siyāsi* atau paling tidak berusaha meninjau kembali akan adanya relasi yang mendasar antara tasawuf dalam Islam dan nasionalisme di Indonesia.

Daftar Rujukan

- A'dam, Syahrul. *Tarekat Shiddīqiyyah di Indonesia (Studi tentang Ajaran dan Penyebarannya)*. Disertasi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
- Ali, Yunasril. *Sufisme dan Pluralisme: Memahami Hakikat Agama dan Relasi Agama-Agama*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

- Atjeh, Aboebakar. *Pengantar Ilmu Tarekat (Uraian Mistik)*. Solo: Ramadhani, 1992.
- Azra, Azyumardi, “Sufisme dan ‘yang Modern’”, Martin van Bruinessen et al. (ed), *Urban Sufism*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Billah, Muntashir. *17 Agustus 1945 Bukan Kemerdekaan Republik Indonesia*. Jombang: Al Ikhwan, 2012.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Emst, Carl W. *Ajaran dan Amaliyah Tasawuf*, terj. Arif Anwar. Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003.
- Kurdi (al), Muhammad Amin. *Tamwīr al-Qulūb fī Mu‘āmalat ‘Ulūm al-Ghuyūb*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1994.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Majalah al-Kautsar: Jendela Shiddiqiyah*, vol. 10, 2004.
- Makkī (al), Abū Ṭalīb. *Buku Saku Hikmah dan Makrifat: Mengerti Kedalaman Makna Berilmu dan Bertaubid dalam Kehidupan*, terj. Abad Badruzzaman. Jakarta: Zaman, 2013.
- Mu’thi, A. Wahib. *Tarekat: Sejarah Timbulnya, Macam-macam, dan Ajaran-ajaran Tasawuf*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.th.
- , *Dasar dan Sumber Aspirasi Berdirinya Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia: yang Dijivai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan*. Ploso, Jombang: Akas, 2009.
- , *Informasi tentang Shiddiqiyah*. Jombang: YPS, 1992.
- , *Menyingkap Kegelapan Hati*. Jombang: Al Ikhwan, 2002.
- , *Penjelasan Singkat Mengenai Delapan Kesanggupan*. Ploso, Jombang: al-Ikhwan, t.th.
- Mufid, Ahmad Syafi’i. *Tangklukan, Abangan dan Tarekat: Kebangkitan Agama di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Mukhtar, Hilmy. “Dinamika NU: Suatu Studi tentang Elite Kekuatan Politik Islam di Jombang Jawa Timur”. Tesis—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Mursito, Lilik. “Wali Allah Menurut al-Hakim dan Ibn Taymiyah”, *Jurnal Kalimah*, vol. 13, no. 2. September, 2015.
- Mustofa, Imron. “Fisika Atom sebagai Basis Filosofis Ilmu dalam Perspektif al-Ghazali”, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol. 12, no. 1. Juni, 2017.

- ". "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi tentang kerangka metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))". Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Naqṣabandī (al), Aḥmad. *Kitāb Jāmi' al-Uṣūl fī al-Awliyā'*. Mesir: Maṭba'ah Wahbīyah, 1298 H.
- Nasution, Harun. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- ". *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Qāshānī (al), 'Abd al-Razzāq. *Iṣṭilāḥāt al-Ṣūfīyah*, ed: Kamar Ibrāhīm Ja'far. Kairo: Hai'ah 'Āmmah al-Miṣrīyah, 1981.
- Qushayrī (al), Abū al-Ḥusayn Muslim b. al-Hajjāj. *Al-Risālah al-Qushayrīyah fī 'Ilm al-Taṣawwuf*. Mesir: Maṭba'ah al-Adabīyah, 1319 H.
- Randī (al), Ibn. Abbad. *Sharḥ al-Ḥikam*, vol. 2. Indonesia: Sangkapura-Jeddah, t.th.
- Sha'rānī (al), 'Abd Wahhāb. *al-Anwār al-Qudsīyah fī Ma'rīfat Qawā'id al-Ṣūfīyah*, ed: Tāha 'Abd al-Baqī Surūr, vol. 11. Bayrūt: Maktabah al-Ma'ārif, 1962.
- Sunanto, Musyrifah. "Tarekat Khalwatiyah Perkembangannya di Indonesia", Sri Mulyati et. al., *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sutikno, Wady, et al. *Wali Songo Republik Indonesia*. Jombang: Al Ikhwan, 2009.